



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (L K j I P) TAHUN 2021**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan dan sasaran mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari kendala – kendala teknis yang dihadapi oleh masing – masing SKPD. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai narasumber yang kompeten. Mudah – mudahan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun – tahun berikutnya.

Banyuwangi, Pebruari 2022

Plt. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI,



MUHAMAD LUTFI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196703061988091001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
- Isu Strategis.....	1
▪ Tugas dan Fungsi Bakesbangpol.....	4
▪ Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	6
▪ Strategi dan Kebijakan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
- Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Akuntabilitas Kinerja	17
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	19
3.3 Analisis Efektifitas dan Efisiensi.....	21
BAB IV PENUTUP	24

Lampiran:

- 1) Pengukuran Kinerja
- 2) Matrik Rencana Strategis

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan perjanjian kinerja (performance agreement) tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematis penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan secara teknis diatur dalam PERMENPAN-RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 2 (dua) sasaran. Adapun sasarannya adalah :

1. Meningkatnya pemahaman dan sikap masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah

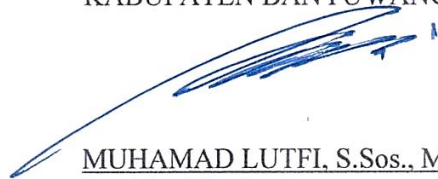
Tolok ukur sasaran pertama adalah tidak adanya konflik SARA dan IPOLEKSOSBUDKANKAM di masyarakat sehingga realisasi target sasaran 100%, dan untuk sasaran kedua target yang telah direncanakan adalah 67 %, karena tidak ada pelaksanaan pemilu pada tahun 2021 maka yang menjadi tolok ukur adalah Pilkada

serentak yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya terealisasi rata-rata 70%.

Realisasi target sasaran yang terpenuhi, menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Banyuwangi, Pebruari 2022

Plt. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI,



MUHAMAD LUTFI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196703061988091001

,

BAḂI

PENDAHULUAN

ISU STRATEGIS

Diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, guna membina dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan manajemen stratejik yang menempatkan organisasi pada titik yang stratejik, sehingga akan diperoleh prospek (keuntungan/kemakmuran), terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk lebih memfokuskan aspek strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, salah satu *Outcome* yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi melalui perencanaan strategis adalah pemerintahan yang akuntabel sebagai implementasi dari *good governance*, menuntut penyelenggaraan pemerintah yang bertumpu pada partisipasi rakyat, keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan. *Outcome* tersebut diwujudkan melalui pembaharuan manajemen pemerintahan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi berperan serta mewujudkan hal ini melalui *core businessnya*, yaitu pengawasan kegiatan pemerintah baik pusat maupun daerah secara profesional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi, situasi dan kondisi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Lingkungan internal oragnisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali.

Dalam merumuskan aspek strategis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dapat menggunakan metode atau teknik analisis **SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)** atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

1. Kekuatan (Strengths)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dalam mencapai visi dan misi, adalah :

- a. Memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengembangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi No. 84 Tahun 2016;
- b. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk bekerja normatif dan taat aturan
- c. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparatur untuk melaksanakan tugas dan tupoksi masing-masing.
- d. Dukungan perangkat organisasi yang solid.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan analisis adalah :

- a. Sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih sangat minim.
- b. Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum sepenuhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
- c. Penempatan karyawan terhadap bidang kerja belum memperhatikan pengalaman dan latar belakang pendidikan.
- d. Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal ideal.
- e. Pola pembinaan aparatur yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

3. Peluang (Opportunities)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dalam mencapai visi dan misinya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, antara lain :

- a. Dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, pemerintah daerah telah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi untuk membuat aturan-aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan, pengembangan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kualitas Sumber daya manusianya guna mewujudkan pelayanan yang profesional.
- c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam pengembangan wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat positif dan dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi

4. Ancaman (Threats)

Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datangnya dari luar organisasi/ eksternal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam pencapaian tingkat keberhasilan, diantaranya kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi

Dari hasil identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal, maka dilakukan analisis dan pembobotan untuk masing-masing unsur guna menentukan strategi yang diperlukan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Strategi yang akan ditempuh merupakan paduan antara faktor kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi faktor kelemahan yang ada dan menghindari segala ancaman yang dihadapi oleh organisasi tersebut.

Dari beberapa aspek strategis tersebut, dapat disimpulkan isu-isu strategis yang menjadi dasar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan sasaran dan tujuan yang dituangkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. **Adapun isu-isu strategis tersebut adalah:**

- 1. Masih rentannya isu-isu berbaur SARA dan IPOLEKSOSBUDHANKAM di masyarakat;**
- 2. Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat Kabupaten Banyuwangi;**

3. **Belum optimalnya ormas dalam mendukung program-program pemerintah kabupaten;**
4. **Belum optimalnya tingkat partisipasi toga dan tomas dalam mensosialisasikan program-program pemerintah daerah.**

▪ **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

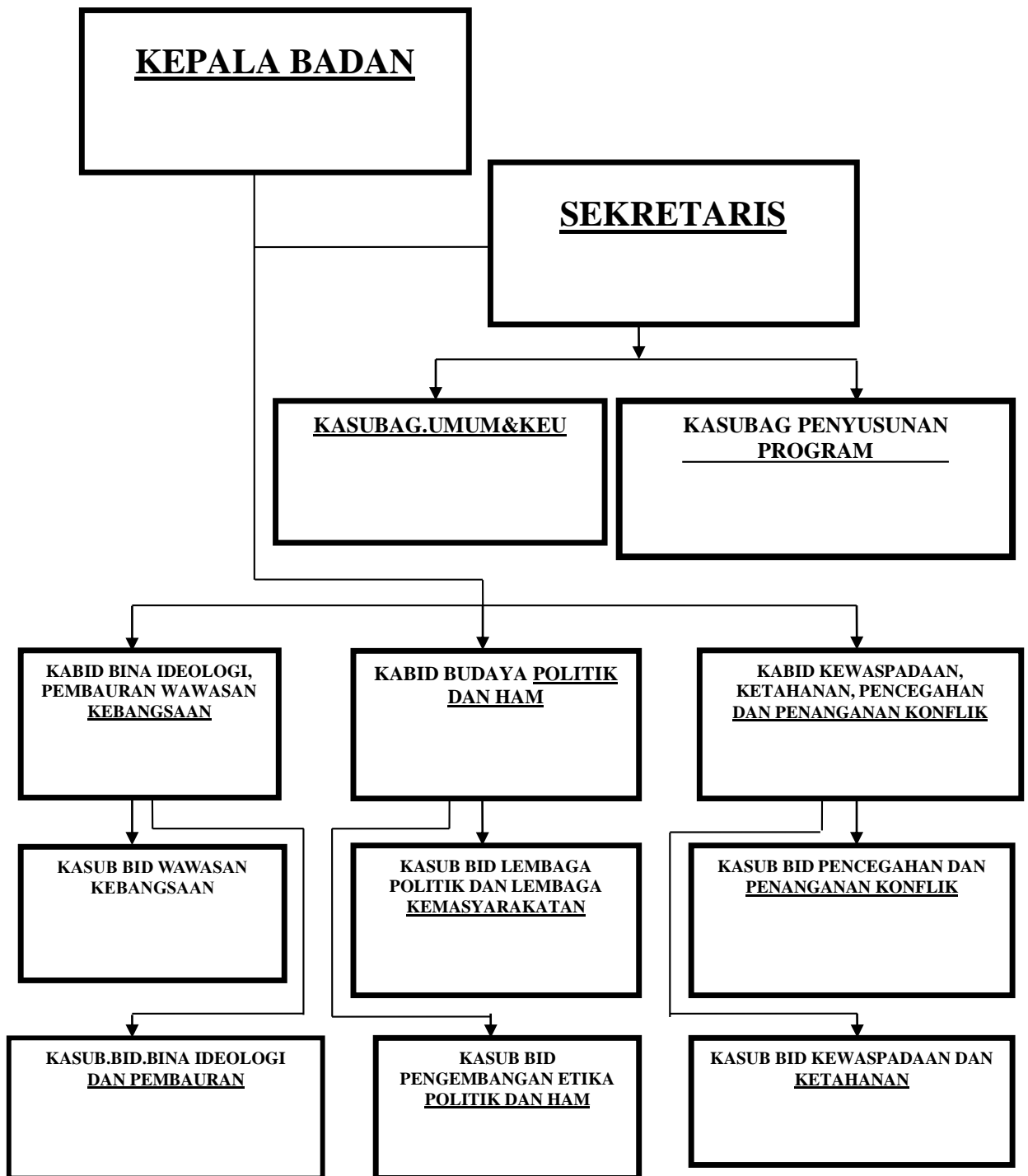
2. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan bangsa dan Politik;
- b. Pengorganisasian penyusunan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

STRUKTUR ORGANISASI BAKESBANGPOL KAB. BANYUWANGI



▪ **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD 2021-2026;
2. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi 2021-2026;
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Untuk mewujudkan Rencana Strategis sebagai pedoman tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi yaitu :

a. Visi

Visi Kabupaten Banyuwangi adalah:

“ TERWUJUDNYA BANYUWANGI YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA DAN BERKAH”

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi mempunyai misi dalam rangka untuk mencapai visi dimaksud.

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 - 2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan;
2. Membangun SDM Unggul, Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya;

3. Mewujudkan Masyarakat Berkarakter yang Memegang Teguh Nilai-nilai Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat, serta Menguatkan Gotong Royong dan Kerukunan dalam Harmoni Kebhinekaan;
4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;
5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha.

Lima butir misi di atas merupakan janji politis Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi terpilih kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Merujuk terhadap RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021,

Dalam konteks manajemen strategis, untuk memudahkan menyusun arsitektur kinerja pembangunan, maka Misi kepala daerah di atas dilakukan transformasi menjadi Misi Pembangunan. Transformasi ini dilakukan dengan tidak menghilangkan makna dan substansi dari Misi Kepala Daerah yang dibawa pada saat pilkada. Transformasi ini dilakukan dengan cara membaca ekstraksi dari makna misi dan melakukan clustering dengan mempertimbangkan bidang dan fungsi dari terjemahan misi tersebut.



Dengan memperhatikan proses transformasi Misi Kepala Daerah terpilih kepada Misi Pembangunan Daerah, maka Misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan;
2. Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif;
3. Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Adapun logframe perencanaan terintegrasi dengan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah:

Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 1

"Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan;"



Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 2

"Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif;"



Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 3

Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.



Sesuai Tugas pokok dan fungsi yang melaksanakan urusan pemerintahan umum maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai logframe perencanaan terintegrasi Misi 2, yaitu *Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif*.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari rumusan capaian strategis Kabupaten Banyuwangi yang merepresentasikan atau tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah yang dijabarkan melalui gambar arsitektur kinerja Banyuwangi sesuai Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Masing-masing sasaran terdapat intervensi program prioritas yang merupakan kumpulan dari program program pembangunan pembangunan daerah terdapat keterlibatan lintas perangkat daerah/lintas urusan untuk mendorong pencapaian sasaran Pemerintah Daerah. Program prioritas daerah dilaksanakan bersama dengan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian Misi.

Adapun gambar arsitektur kinerja yang sesuai dengan Misi yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:



Adapun program prioritas dalam RPJMD tahun 2021 -2026 yang harus dilaksanakan oleh badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Sasaran 4: Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya																	
		Indeks Kesalahan Sosial (IKS)	Indeks	n/a	63	940,71	64,5	5.567,30	66	5.599,84	67,5	5.633,89	69	5.669,52			
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Angka potensi konflik SARA di masyarakat	kejadian	1	2	400,00	2	988,88	2	994,65	2	1.000,70	2	1.007,03	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dihima	%	65	70	95,00	80	139,86	80	140,67	90	141,53	90	142,42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan program prioritas dalam RPJMD tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi menyusun tujuan dan sasaran sebagai dasar tolok ukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Adapun Tujuan dan Sasaran Bakesbangpol adalah:

Tujuan: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa

Sasaran: 1. Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Tentang Nilai-Nilai Kebangsaan,

2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak-Hak Politik Untuk Pembangunan Daerah

d. Strategi dan kebijakan

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk mencapai tujuan keberhasilan organisasi yang diinginkan sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 dan analisa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, maka arah kebijakan yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui pembinaan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, pembinaan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat serta kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa di kalangan seniman dan budayawan;
2. Produk inteljen dan hasil rapat Forpimda sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan pembangunan maupun penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Penerbitan regulasi terkait pedoman pendaftaran ormas/LSM dan parpol serta pendidikan politik bagi masyarakat;

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi maka dapat dijabarkan kondisi umum sesuai tugas pokok dan fungsi utamanya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur Negara dalam menyukkseskan pembangunan nasional.

Pengertian Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu pada Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Tahun 2021-2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi menetapkan Indikator Kinerja Utama, yaitu:

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUWANGI

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik	1	Indeks kepuasan masyarakat		survey IKM Sekretariat
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam persatuan dan kesatuan bangsa	Tingkat konflik di masyarakat	Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat tentang Nilai-nilai Kebangsaan	2	Tingkat konflik SARA di Masyarakat	(Jumlah konflik SARA di masyarakat/Jumlah konflik yang ada di masyarakat) x 100%	Berdasarkan laporan FKUB/FPK tiap tahun Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan
				3	Tingkat konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM	(Jumlah konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM di masyarakat/Jumlah konflik yang ada di masyarakat) x 100%	Berdasarkan laporan Tim Stabilitas Daerah tiap tahun Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik untuk pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah	4	Persentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya/jumlah daftar pemilih tetap (DPT) X 100%	Laporan hasil PEMILU Bidang Budaya Politik dan HAM

PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGS DAN POLITIK TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET OUTPUT/OUTCOME											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5											
1	Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0
2	Meningkatnya pemahaman dan sikap masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan	Tingkat konflik IPOLEKSOSBUDHANKAN	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		Tingkat konflik SARA di Masyarakat	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Persentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0
4	Meningkatnya program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik	persentase pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik	%	5	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9

NO	PROGRAM	JML ANGGARAN (Rp.)	KET
1	Kesatuan Bangsa dan politik	10.990.914.847,00	APBD
2	Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	497.759.800,00	APBD
3	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	106.068.960,00	APBD
4	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.387.102.960,00	APBD
5	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan konflik Daerah	2.118.101.365,00	APBD
6	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	2.789.162.880,00	APBD
7	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.092.718.882,00	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 dengan realisasinya. Target Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN	SUMBER DATA	TARGET KINERJA 2021	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN
1.	Meningkatnya pemahaman dan sikap masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan	1	Tingkat konflik SARA di masyarakat	Jumlah konflik SARA di masyarakat/ jumlah konflik yang ada X 100%	Laporan FKUB/ FPK setiap tahun	0 %	0%	100%
		2	Tingkat konflik IPOLEKSOS-BUDHANKAM	Jumlah konflik IPOLEKSOS-BUDHANKAM di masyarakat/ jumlah konflik yang ada X 100%	Laporan kominda tiap tahun	0%	0%	100%
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah	1	Persentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya/jumlah daftar pemilih tetap (DPT) X 100%	Laporan hasil pemilu	67%	70%	104%

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat tentang Nilai-nilai Kebangsaan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	realisasi	%
Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat tentang Nilai-nilai Kebangsaan	1. Tingkat konflik SARA di masyarakat	0%	0%	100%
	2. Tingkat konflik IPOLEKOSBUDHANKAM	0%	0%	100%

Pada tahun 2021 tidak ada konflik SARA dan IPOLEKSUDBUDHANKAM di Kabupaten Banyuwangi. Tidak adanya konflik di wilayah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa target sasaran strategis meningkatnya pemahaman dan sikap masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan tercapai. Adapun program pendukung sasaran ini adalah:

- 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;**
- 2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
- 3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;**
- 4. Program Pembiayaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Sasaran Strategis : Meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat dalam menggunakan Hak-hak Politiknya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	realisasi	%
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak-hak politiknya	Persentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah	67%	70 %	104 %

Capaian indikator realisasi untuk indikator persentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah, yang menjadi tolok ukur keberhasilan /realisasi target adalah pelaksanaan PILKADES SERENTAK di Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 karena tidak adanya PEMILU/PEMILUKADA .

Pencapaian target kinerja dari **Program Pendidikan Politik masyarakat** sebesar 104 % dikategorikan **SANGAT BERHASIL**

3.2 Akuntabilitas Keuangan

1. Pagu Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 10.990.914.847,00 dengan rincian :

- Belanja operasional Rp. 10.849.330.547,00
- Belanja Modal Rp. 141.584.300,00

2. Realisasi pada per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 8.294.214.130,00 atau 75,5 % dari pagu anggaran, dengan rincian :

- Belanja Operasioanal Rp. 8.152.759.630,00
- Belanja Modal Rp. 141.454.500,00

Tabel Realisasi Anggaran per Program TA 2021

NO	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.186.036.042,00	3.566.842.435,00	85
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	1.293.785.800,00	1.247.733.300,00	96,4
3.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	497.759.800,00	497.659.740,00	99,9
4.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya politik	2.789.162.880,00	1.843.793.330,00	66,1
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	165.869.840,00	127.145.090,00	76,6

6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.058.300.485,00	1.011.040.235,00	50,9
JUMLAH		10.990.914.847,00	8.294.214.130,00	76

Faktor – Faktor tercapai/tidaknya penyerapan secara keseluruhan:

1. Adanya koordinasi yang intensif antara staf dan pimpinan;
2. Adanya kemauan yang kuat untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi;
3. Adanya beberapa mata anggaran yang tidak dicairkan karena dalam pelaksanaan kegiatan tidak diperlukan.
4. Adanya kegiatan yang terkendala pandemi covid 19, sehingga berdampak tidak tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.
5. Belanja hibah untuk instansi vertikal tidak realisasi karena tidak ada satupun instansi yang mengajukan kebutuhan anggaran;
6. Belanja hibah bantuan politik tidak terealisasi 100% karena ada satu partai politik yang tidak mengajukan dengan alasan permasalahan internal partai.

3.3 Analisis Efektifitas dan Efisiensi

A. EFEKTIFITAS

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realiasi Kinerja	Capaian Kinerja (Realisasi Kinerja / Target Kinerja)*100	Ket
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala	85	85	100,00	Efektif
2.	Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat tentang Nilai-nilai Kebangsaan	Tingkat konflik SARA dan IPOLEKSOSBUDKAN HAM di Masyarakat	Kejadian	0	0	100,00	Efektif
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak-hak Politik untuk Pembangunan Daerah	Persentase Angka Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan hak hak Politik untuk Pembangunan Daerah	Persen	65	70	104,00	Efektif

B. EFISIENSI

No	Sasaran	Target Kinerja	Realiasi Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi	Ket	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
		$(b/a) \times 100\%$					$= \frac{(dxc)-e}{(dxc)} \times 100\%$		
							d	c	e
							4.186.036.042	1,00	3.566.842.435
								4.186.036.042	3.566.842.435
									619.193.607
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik	85	85	100%	4.186.036.042	3.566.842.435	0,15	efisien	
					1.293.785.800	1.247.733.300	d	c	e
					497.759.800	497.659.740	4.015.715.925	1,00	2.883.578.365
					165.869.840	127.145.090,0		4.015.715.925	2.883.578.365
					2.058.300.485	1.011.040.235			1.132.137.560
2.	Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat tentang Nilai-nilai Kebangsaan	0	0	100%	4.015.715.925	2.883.578.365	0,28	Efisien	

							d	c	e
							2.789.162.880	1,04	1.843.793.330
								2.914.050.770	1.843.793.330
									1.070.257.440
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak-hak Politik untuk Pembangunan Daerah	67	70	104%	2.789.162.880	1.843.793.330	0,37		efisien

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 merupakan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi serta Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi .

Secara keseluruhan hasil capaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut berdasarkan perbandingan target dan realisasi, sangat memuaskan dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, dengan anggaran Rp. 10.960.914.847,00 terealisasi Rp. 8.294.214.130,00 atau sebesar 76 %, dengan kategori **BAIK atau BERHASIL**.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi untuk dapat dipergunakan sebagai perlunya.

Banyuwangi, Pebruari 2022

Plt. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI,



MUHAMAD LUTFI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196703061988091001

